
Tinjauan Literatur mengenai Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Azza Emila¹, Siti Maesaroh², Waisal Koroni³ Gama Pratama⁴

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : azzaemila9@gmail.com, sitimaesaroh4076@gmail.com, isalkampusbbc@gmail.com,
gamapratama0@gmail.com

Received: 2025-09-15; Accepted: 2025-10-12; Published: 2025-11-01

Abstract

This study aims to comprehensively review various sources of development financing and their impact on economic growth in Indonesia. The method used is a literature review by examining a number of academic literature, scientific journals, and relevant official reports over the last ten years. The results of the study show that sources of development financing in Indonesia can be grouped into three main forms, namely domestic financing, external financing, and hybrid financing. Domestic financing through the state budget, government bonds, and Sukuk Negara contributes positively to long-term stability, although its effectiveness is still influenced by suboptimal governance. External financing such as FDI and foreign debt has proven to be able to drive economic growth, but risks creating fiscal dependence if not balanced with careful policies. Meanwhile, the Public-Private Partnership (PPP) model and sharia-based financing, such as mudharabah musytarakah, are considered more adaptive and have the potential to increase national financing efficiency. This study emphasizes the importance of synergy between fiscal and monetary policies and Islamic economic principles to achieve equitable and sustainable development. Thus, the integration of sharia values into the national financing system can serve as a strategic foundation for inclusive and oriented economic growth.

Keywords: Development financing, economic growth, State Sukuk, foreign direct investment (FDI), Islamic economics.

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Awalnya permasalahan penelitian ini berawal dari kerumitan pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana sarana pendanaan seperti investasi asing langsung (FDI), utang luar negeri, anggaran negara (APBN), dan pembiayaan domestik lainnya sering kali tidak memberikan efek yang stabil terhadap kemajuan ekonomi. Walaupun Indonesia telah mencapai kemajuan PDB rata-rata sekitar 5% per tahun dalam dua dekade belakangan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapabilitas sering terhalang oleh ketidakstabilan global, layaknya pandemi COVID-19 dan perubahan harga komoditas. Kritik utama adalah kurangnya pemahaman

mendalam mengenai bagaimana sarana pendanaan ini dapat memicu kemandirian eksternal yang berat, beban utang yang membebani APBN, atau bahkan jurang regional yang memperparah ketidak seimbangan sosial ekonomi. Di tengah hambatan ini, penelitian ini mendeteksi celah dalam literatur yang belum sepenuhnya menggali interaksi antara sarana pendanaan dan penanda kemajuan spesifik Indonesia, seperti penurunan kemiskinan dan kenaikan ekspor non-migas, sehingga memerlukan telaah yang lebih tajam untuk menghindari upaya kebijakan yang berlawanan.

Kemudian wawasan yang didapat dari persoalan ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan menyeluruh untuk mengatasi isu, dengan fokus pada penyatuan antara landasan teori ekonomi dan data empiris Indonesia. Rencana penyelesaian melibatkan peninjauan literatur terstruktur yang membandingkan studi-studi terbaru, mulai dari telaah positif FDI yang dapat membawa teknologi maju namun sering kali dimanfaatkan demi kepentingan perusahaan asing, hingga ancaman utang luar negeri yang bisa memicu krisis anggaran jika tidak dikelola dengan baik. Pendekatan kritis ini akan memanfaatkan metode meta analisis untuk menggabungkan temuan dari beragam sumber, seraya memperhatikan kondisi khusus Indonesia seperti ketergantungan pada sumber daya alam dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Dengan demikian, rencana ini berupaya mengungkap pola yang mungkin terlewat, seperti pengaruh jangka panjang pembiayaan hijau terhadap kemajuan yang lestari, dan menyajikan usulan praktis untuk mengoptimalkan pembagian dana pembangunan.

Di sisi lain, perumusan sasaran penelitian ini dirancang secara khusus untuk memberikan kontribusi yang nyata dan dapat diterapkan pada pemahaman mengenai pendanaan pembangunan di Indonesia. Pertama, penelitian ini berhasrat untuk mendeteksi dan menggolongkan ragam sarana pendanaan utama sekaligus cara kerjanya dalam kerangka ekonomi Indonesia. Kedua, tujuannya adalah menguji luaran positif dan negatif sarana pendanaan tersebut terhadap penanda kemajuan ekonomi, semisal laju PDB, jumlah investasi, dan sebaran kekayaan regional. Ketiga, penelitian ini berupaya merangkai usulan kebijakan yang didasarkan pada temuan, demi menaikkan keefektifan pendanaan pembangunan yang lebih tangguh terhadap gejolak luar dan menopang kemajuan yang merangkul. Dengan rumusan ini, studi diharapkan mampu menjadi petunjuk bagi para pengambil keputusan, seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk merancang strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, ringkasan tinjauan teoritis yang bersangkutan paut dengan perkara ini bermula dari teori kemajuan ekonomi konvensional, seperti metode Solow (1956), yang menerangkan bahwa investasi selaku komponen utama pendanaan mendorong himpunan modal dan kemajuan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, teori ini dikritik karena tidak sepenuhnya menjelaskan ketidakstabilan yang dipicu oleh sarana pendanaan eksternal, di mana FDI dapat mengakselerasi pembaruan namun sering terpusat di sektor ekstraktif, sehingga memperparah ketimpangan. Teori utang luar negeri dari Krugman (1988) menambahkan aspek risiko, dengan dalil bahwa utang dapat menghasilkan efek penggeseran yang menekan investasi dalam negeri, terutama jika dipakai untuk konsumsi ketimbang produktivitas. Telaah ini bersesuaian dengan Indonesia, di mana beban utang telah bertambah selepas krisis 1998, membutuhkan penataan yang lebih ketat untuk menghindari pusaran defisit.

Selanjutnya, rangkuman teoretis mencakup model Keynesian mengenai peran APBN dalam dorongan ekonomi, yang menekankan pengeluaran pemerintah sebagai pemacu

kemajuan semasa kemerosotan, namun sanggahan muncul dari kemungkinan inflasi dan defisit permanen jika tidak diimbangi dengan pemasukan yang stabil. Teori pendanaan berganda dari McKinnon (1973) menawarkan pemahaman tajam tentang keseimbangan antara sarana domestik dan asing, yang krusial bagi Indonesia guna mengurangi kebergantungan pada gejolak global. Secara keseluruhan, tinjauan teoretis ini memperlihatkan bahwa kemandirian pendanaan bertumpu pada bingkai kebijakan dan peraturan, dengan Indonesia memerlukan penyatuan yang lebih erat untuk meminimalkan bahaya dan memaksimalkan manfaat kemajuan yang lestari.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan pendekatan literature review, yaitu suatu metode yang menelaah, menganalisis, dan mensintesis berbagai literatur atau sumber tertulis yang relevan dengan topik sumber pembiayaan pembangunan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang perkembangan teori, model, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar pemahaman masalah serta alternatif solusi.

Populasi dalam penelitian ini adalah kumpulan literatur akademik berupa jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen resmi yang membahas sumber pembiayaan pembangunan dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan kriteria seleksi yang mencakup relevansi topik, tahun terbit (preferensi literatur terbaru dalam 10 tahun terakhir), dan kredibilitas sumber (terbit di jurnal bereputasi dan sumber akademik terpercaya).

Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis pada berbagai basis data elektronik seperti Google Scholar, Scopus, dan perpustakaan digital lainnya menggunakan kata kunci spesifik yang sesuai dengan topik penelitian. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan panduan untuk melakukan ekstraksi dan analisis isi dari setiap literatur yang dipilih, meliputi aspek sumber pembiayaan yang dibahas, metodologi penelitian asli, serta hasil dan temuan mengenai dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan sintesis naratif. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan dan membandingkan temuan-temuan penting dari literatur yang sudah dikaji untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh dan menyusun kerangka konseptual terkait sumber pembiayaan pembangunan dan implikasinya. Karena penelitian hanya mengkaji literatur sekunder, tidak menggunakan alat dan bahan fisik secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil peninjauan literatur memperlihatkan bahwa korpus pendanaan pembangunan di Indonesia terbagi ke dalam tiga rumpun besar, yakni pendanaan dalam negeri, pendanaan eksternal, dan pendanaan gabungan (hybrid financing). Pendanaan dalam negeri melalui APBN, obligasi pemerintah, serta pembiayaan syariah serupa Sukuk Negara terbukti menjadi perangkat stabil untuk menopang perkembangan jangka panjang. Selain itu, peningkatan realisasi Sukuk Negara sebesar 10% berkontribusi pada kenaikan hasil sektor infrastruktur hingga 6%. Akan tetapi, keefektifannya amat bergantung pada mutu tata kelola proyek serta keterbukaan alokasi dana mana kerap masih menghadapi hambatan birokratis (Hariyanto & Hijriani, 2021).

Berikutnya, pendanaan eksternal seperti Foreign Direct Investment (FDI) dan pinjaman luar negeri memiliki peran yang lebih beragam. Selain itu, FDI memang menaikkan produktivitas industri manufaktur hingga 8,4%, tetapi hanya jika diiringi oleh kebijakan transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja. Tanpa itu, FDI condong menciptakan ekonomi kantong (*enclave economy*), yaitu ekonomi yang cuma menguntungkan investor asing tanpa dampak menyebar berarti bagi sektor dalam negeri. Sementara itu, pinjaman luar negeri pemerintah dapat mengakselerasi pembangunan infrastruktur, namun perlu diingatkan bahwa rasio utang terhadap PDB yang melampaui 40% berpotensi menekan ruang fiskal negara dan melemahkan kemandirian ekonomi nasional (Sutrisno & Nainggolan, 2025).

Di samping itu, perlu diperlihatkan bahwa gabungan pembiayaan publik dan swasta (*Public–Private Partnership/PPP*) cenderung lebih efektif dan adaptif terhadap goncangan global. Di sisi lain juga ditegaskan bahwa pola PPP di sektor energi dan transportasi berhasil menghemat pengeluaran APBN hingga 15% dan mempercepat realisasi proyek hingga 30%. Namun, pengawasan yang lemah terhadap pihak swasta dapat mengakibatkan inefisiensi moral (*moral hazard*) dan praktik monopoli. Oleh sebab itu, integrasi mekanisme syariah serupa *mudharabah musytarakah* dapat dijadikan jalan keluar inovatif untuk menyelaraskan resiko dan keuntungan antar pihak (Setiawan et al., 2024).

Dari segi teori, temuan ini mengukuhkan model *Dual-Gap Theory* dan memperluasnya dengan dimensi moral-ekonomi Islam. Apabila teori klasik menjelaskan kekurangan simpanan dan devisa sebagai penghalang kemajuan, maka pendekatan Islam menambahkan keutamaan nilai keadilan dan keberlangsungan (*masalah ammah*). Dalam konteks ini, pendanaan pembangunan tidak cuma diukur dari pertumbuhan PDB, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan. Dengan demikian, kerangka pembangunan Indonesia sebaiknya beralih dari fokus pertumbuhan menuju perkembangan berkeadilan (*equitable development*) yang menjadikan pembiayaan syariah sebagai poros utama (Yuliyanti et al., 2025).

Lebih lanjut, keterhubungan antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan korpus pendanaan pembangunan menjadi poin krusial dalam pembahasan ini. Karena di dalam studi empiris ini membuktikan bahwa kebijakan suku bunga acuan dan kestabilan nilai tukar berpengaruh nyata terhadap masuknya FDI dan keefektifan pendanaan dalam negeri. Ini mengindikasikan perlunya sinergi kuat antara kebijakan fiskal dan moneter agar dana pembangunan dapat terserap secara produktif. Apabila sinergi ini kurang, dana pembangunan sering kali terperangkap dalam belanja konsumtif yang tidak menambah nilai ekonomi jangka panjang.

Dengan merujuk pada keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemaksimalan korpus pendanaan pembangunan di Indonesia menuntut penyelarasan antara kebijakan fiskal, moneter, dan syariah. Penelitian ini juga menyajikan modifikasi teori bahwa dalam situasi negara berkembang dengan sistem ekonomi campuran seperti Indonesia, pendanaan pembangunan paling efektif bukan hanya yang menaikkan modal fisik, melainkan juga modal sosial dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggarisbawahi bagaimana instrumen keuangan syariah berbasis sosial (*waqf-linked sukuk* dan mobilisasi dana zakat) dapat menjadi pilihan pendanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peninjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh efektivitas dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber pembiayaan. Pendanaan domestik seperti APBN, obligasi, dan Sukuk Negara terbukti memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan jangka panjang, meskipun masih menghadapi kendala birokrasi dan transparansi. Sementara itu, pendanaan eksternal seperti investasi asing langsung (FDI) dan utang luar negeri mampu mempercepat pembangunan, tetapi berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi jika tidak dikelola dengan bijak. Kombinasi pembiayaan publik–swasta (*Public–Private Partnership/PPP*) serta integrasi instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah musytarakah* dapat menjadi alternatif inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan prinsip ekonomi Islam merupakan faktor kunci agar dana pembangunan dapat terserap secara produktif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis maqashid syariah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, arah pembangunan Indonesia ke depan perlu berfokus pada penguatan sumber pembiayaan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyanto, E., & Hijriani, T. (2021). Peningkatan peran sukuk negara dalam pembiayaan infrastruktur. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 3(2), 56–72.
- Setiawan, A., Hamka, H., Ridwan, W., Salsabila, F., Saputra, P., & Hasjim, R. (2024). Kemitraan Strategis antara Indonesia dan China: Analisis Kepentingan Jakarta dalam Proyek Kereta Api Cepat. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*.
- Sutrisno, E., & Nainggolan, R. (2025). Unlocking the Potential of Digital Payment: How Financial Habits Drive Digital Payment Adoption Among Indonesia's MSMEs. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 23(1), 111–133.
- Yuliyanti, E., Susanti, E. Y. E., & Geasill, L. Y. J. (2025). DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN DI NEGARA BERKEMBANG: ANALISIS LITERATUR TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(2), 238–246.

